NOVEL INDONESIA SETELAH 1998: DARI SASTRA TRAUMATIK KE SASTRA HEROIK

Aprinus Salam

ABSTRAK *Tulisan ini membicarakan perkembangan novel Indonesia setelah 1998. Dengan demikian, kajian ini membicarakan lingkungan eksternal yang secara signifikan berpengaruh terhadap penulisan novel. Latar kondisi (diskursif) tahun 1965 hingga 1998 dipakai untuk membuktikan bahwa pada tahun-tahun tersebut novel Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh situasi eksternalnya.*

Novel Indonesia setelah tahun 1998 menunjukkan pergeseran dari sastra sastra traumatik ke sastra heroik. Sastra heroik ini bercirikan 1) tidak lagi melarikan kesalahan sejarah masa lalu, tetapi lebih mendesak untuk memperbaiki keadaan yang memperihatinkan pada saat ini, 2) cenderung tidak lagi merekonstruksi sejarah 3) mengambil setting pada masa Orba, 4) bercerita dalam suasana reaktif daripada reflektif, 5) terdapat ketegangan antara harapan reformasi dan kenyataan yang dihadapi 6) adanya semangat reformasi dengan tidak ada lagi hal yang perlu ditakuti.

KATA KUNCI *novel, sastra traumatik, sastra heroik*

1. Pengantar

Ada dua kecenderungan utama dalam telaah sosiologi terhadap sastra. Pertama, pendekatan yang berdasarkan anggapan bahwa sastra merupakan cermin proses sosial ekonomis belaka. Pendekatan ini bergerak dari faktor-faktor di luar sastra untuk membicarakan sastra, sastra hanya berharga dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar sastra. Dalam hubungan ini, teks sastra tidak dianggap utama, teks sastra hanya merupakan *epiphenemenon* (gejala kedua). Kedua, pendekatan yang mengutamakan teks sastra sebagai bahan penelaahan. Metode yang digunakan dalam sosiologi sastra ini adalah analisis teks untuk mengetahui strukturnya, kemudian dipergunakan untuk memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang di luar sastra (Damono, 1984: 2-5).

Grebstein (1968: 161-169), yang teorinya disebut pendekatan sosio-kultural terhadap sastra, mengatakan bahwa dalam rangka memahami karya sastra secara komprehensif karya tersebut tidak

Aprinus Salam adalah dosen Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Bbudaya Universitas Gadjah Mada. Alamat korespondensi: Jl. Humaniora 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Email: aprinussalam@gmail.com

dapat dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan atau peradaban yang telah menghasilkannya. Ia harus dipelajari dalam konteks yang seluas-luasnya, dan tidak hanya dirinya sendiri. Setiap karya sastra adalah hasil pengaruh timbal-balik yang rumit dari faktor-faktor sosial dan kultural, dan karya sastra merupakan objek kultural yang rumit. Bagaimanapun, karya sastra bukanlah suatu gejala sastra yang berdiri sendiri.

Hal itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Balibar dan Macherey (1987: 80, 84) bahwa fenomena karya sastra menjadi tidak ada di luar kondisi-kondisi sosial dan sejarahnya. Itu pula sebabnya, Grebstein mengatakan bahwa masyarakat, khususnya peneliti, dapat mendekati karya sastra dari dua arah, pertama, sebagai suatu kekuatan atau faktor material istimewa, dan kedua, tradisi yakni kecenderungan-kecenderungan spiritual ataupun kultural yang bersifat kolektif.

Bentuk dan isi karya sastra dapat mencerminkan perkembangan sosiologis, atau menunjukkan perubahan-perubahan yang halus dalam watak kultural. Dengan demikian, teks sastra merupakan transformasi proses tawar-menawar kehidupan individual dengan dan dalam formasi sosial yang terjadi secara imajinari (Storey, 1993: 111-112; Payne, 1997: 37-41; Eagleton, 1983: 171-172). Sejalan dengan itu, teks sastra sebagai praktik sosial terjadi berkat dan dalam ideologi (Balibar dan Macherey, 1987: 84.). Dengan demikian, ideologi diartikan sebagai praktik-praktik yang dipercaya dan diyakini yang saling berhubungan dengan praktik dan struktur kekuasan tempat menusia tersebut hidup (Eagleton, 1983: 14).

2. Sastra Traumatik

Pada paruh kedua tahun 1965, terjadi peristiwa penting, dan ke depan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem kenegaraan dan bermasyarakat di Indonesia, yakni apa yang biasa disebut peristiwa G 30 September (+PKI). Cukup banyak kajian dan tulisan yang mengkaji sebab musabab dan dampak dari peristiwa tersebut. Bukan konfliknya saja yang menakutkan, tetapi justru akibat dari perang internal tersebut. Warga Indonesia, yang memang terlibat atau tidak, yang sekadar ikut-ikutan, bahkan yang tidak tahu menahu telah ikut terbantai. Dalam perseteruan yang keras tersebut, sejumlah kajian mengatakan bahwa peristiwa tersebut telah membantai sekitar 500.000 hingga 1 juta orang Indonesia. Bahkan beberapa

kajian menyebutkan hingga 2 juta orang (Lihat kompilasi yang dilakukan Sulistyo, 2000). Peristiwa tersebut menciptakan *trauma* bekepanjangan yang hingga kini orang Indonesia masih merasakan dampaknya.

Berdasarkan peristiwa itu, pada tahun 1966 Soeharto naik jadi kepala negara (presiden) dan segera melakukan berbagai konsolidasi. Dalam praktik politiknya, negara Orde Baru memanfaatkan peristiwa September 1965 tersebut untuk melakukan politik trauma. Soeharto mendapat legitimasi untuk membersihkan pemerintahannya, dan unsur-unsurnya dalam masyarakat, terhadap segala sesuatu yang berbau PKI dan membangun jaringan birokrasi dengan gaya militer dengan hierarki yang terstruktur ketat agar lebih mudah dikendalikan (Emerson, 1978). Akan tetapi, lebih dari itu, pembersihan yang dilakukan Soeharto adalah untuk mengamankan kemapanan kekuasaannya. Segala institusi atau elemen-elemen dalam masyarakat yang berpotensi menjadi satu institusi yang indenpenden, atau berpotensi mengganggu kekuasaan negara, bisa saja "di-PKI-kan".

Strategi lain yang dilakukan Soeharto adalah dengan memecah-mecah berbagai kekuatan dalam masyarakat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dikelompok-kelompokkan dalam berbagai kategori yang berbeda, penerapan birokratisasi, politik massa mengambang, UU SARA, UU Anti-Subversi, pengasastunggalan Pancasila, dan sebagainya. Kasus PPP, PDI, dan HMI yang dipecah-belah adalah contoh yang pantas dicatat. Institusi yang dependen tentu saja secara langsung berkolaborasi dengan negara. Cukup banyak orang Indonesia yang terlibat dalam kolaborasi tersebut dan menjadi abdi-abdi Orde Baru.

Hal yang paling mungkin terjadi, dan sebagian besar telah terjadi, dalam konstruksi dan struktur kekuasaan seperti itu, sadar atau tidak, penguasa mampu menghegemoni masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bersikap (beraktualisasi) sesuai dengan wacana penguasa. Konstruksi wacana yang berhasil dan sekaligus menjadi wacana utama hegemoni Orde Baru adalah negara menempatkan dirinya sebagai penafsir yang memonopoli kebenaran dan yang tidak berasal dari negara dianggap tidak *legitimate*, bahkan sangat mungkin dianggap subversif.

Posisi hegemonik negara itu tidak saja ditunjukkan lewat penguasaan negara dalam mengontrol setiap aspirasi dan aktivitas masyarakat, tetapi juga lewat perekayasaan praktik politik dengan mengontrol daya hidup imajinasi dan kreativitas masyarakat, dan

sekaligus sebagai kontrol terhadap seluruh wacana kebudayaan (Latif dan Ibrahim, 1996).

Sebagai akibatnya, berbagai kondisi itu secara langsung berpengaruh terhadap para pengarang dan calon pengarang di Indonesia. Mereka yang tidak mampu memenuhi kriteria dan norma yang dikondisikan Orde Baru, biasanya generasi yang lebih muda, lari ke aktivisme dalam kegiatan-kegiatan NGO atau LSM-LSM berkolaborasi dengan orang-orang kampus yang ingin bertahan dengan independensinya. Sebagian lain di antara anak-anak muda tersebut mengikuti organisasi kemahasiswaan dan kelompok-kelompok diskusi. Tentu saja LSM, organisasi kemahasiswaan, dan kelompok-kelompok diskusi ini banyak pula variannya. Akan tetapi, secara umum ia menjadi ajang bagi penggodokan untuk "melawan negera Orde Baru," kelak.

Dalam situasi itulah, sastra atau novel tahun-tahun 1970-an hingga 1990-an awal di Indonesia ditulis oleh para pengarangnya. Pada tahun 1970-an, sebagian anak muda yang menjaga independensinya, menulis novel yang kemudian dikategorikan sebagai sastra pop(uler). Generasi Ashadi Siregar muda, seperti Eddy D Iskandar, ANM Masardi, Yudhistira Ardi Nugraha, Teguh Esha, dan lain-lain, menulis novel-novel percintaan yang menyenangkan, tidak mengurus politik dan negara, seperti *Cintaku Di Kampus Biru, Arjuna Mencari Cinta, Ali Topan Anak Jalanan*, dan sebagainya. *Booming* minyak dan praktik pembangunan kapitalisme, sehingga menciptakan kelas menengah yang semakin kaya di beberapa kota, tak pelak menjadi *setting* penceritaan novel-novel populer pada waktu itu. Emosi anak muda pada waktu itu sama sekali tidak mau mengambil resiko untuk mengungkit trauma 1965 yang memakan korban ratusan ribu orang. Sastra menjadi sebuah pelarian traumatik.

Kecenderungan lain dari pelarian terhadap trauma adalah munculnya novel-novel absurd (surealis) seperti diperlihatkan karya Kuntowijoyo, *Khotbah di Atas Bukit*, atau sejumlah karya Putu Wijaya yang cukup banyak itu. Sastra absurd cenderung membangun dunia sendiri, melepaskan diri dari *frame* masyarakat. Novel seperti itu punya alasan untuk bebas dari tekanan dan kontrol kekuasaan politik.

Masyarakat yang membaca sastra 1970-an yang agak cengeng di satu pihak, dan absurd di pihak yang lain, menyebabkan banyak orang mengira bahwa sastra tidak dapat dijadikan sebagai "sarana" untuk melakukan berbagai konsolidasi dan resistensi terhadap

keberadaan negara yang semakin represif dan otoriter. Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi skeptis terhadap sastra seolah sastra adalah sekadar dunia yang menghibur secara ringan dari berbagai persoalan sehari-hari yang menekan, atau justru membuat dunia sendiri yang "mengada-ada". Pada waktu itu, pada 1970-an akhir dan 1980-an awal, memang terjadi krisis keberadaan, peran, dan fungsi sastra, dan sempat menjadi ramai dalam tema "keterpencilan sastra Indonesia". Sastra masuk ke dalam lorong-lorong sempit yang tidak jelas muaranya. Novel dengan cara bercinta di kota (kota besar), atau lari ke dunia antah barantah ternyata justru menyenangkan penguasa Orde Baru.

Pada tahun 1980-an, belajar dari "keterpencilan sastra" dari *frame* masyarakat, kepengarangan diambil alih oleh sekelompok pengarang yang memiliki komitmen terhadap masalah-masalah sosial yang lebih kontekstual dan membumi. Kemudian, muncul isu sastra warna lokal dengan basis pemikiran sastra kontekstual (Heryanto, 1985). Dalam prosesnya, terjadi desentralisasi penulisan novel yang meliputi tema, fakta cerita, dan sarana penceritaan. Kemudian, muncul novel-novel yang kelak disebut dengan sensivitas lokal yang tinggi (Istilah yang diperkenalkan oleh Kuntowijoyo). Pada dekade 1980-an hingga tahun 1990-an awal secara berturut-turut muncul novel seperti *Bumi Manusia* yang terbit pada tahun 1980, dan beberapa tahun kemudian terbit novel lain dari Toer sebagai bagian dari tertralogi Pulau Buru. Pada tahun-tahun berikutnya terbit *Pengakuan Pariyem* karya Linus Suryadi Ag, *Canting* karya Arswendo, Trilogi *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari, *Para Priyayi* yang ditulis Umar Kayam, dan sebagainya.

Tetralogi *Bumi Manusia* karena melanggar koridor yang dibangun negara Orde Baru, novel tersebut dibredel. Walaupun ber-*setting* masa kolonial, novel ini melakukan kritik ideologis dan budaya sehingga secara langsung menyindir kekuasaan Orde Baru. Dalam trilogi Dukuh Paruk, nasib tokoh dan masyarakat Desa Paruk digambarkan sebagai korban dari peristiwa 1965. Dikatakan korban karena sebetulnya mereka tidak tahu menahu urusan politik. Mereka (Srintil dan kawan-kawan) hanya meronggeng dan yang menanggap mereka adalah partai yang kelak kalah dalam perseteruan tersebut sehingga dilarang negara yang berkuasa. *Canting* menyinggung peristiwa 1965 secara dingin dan tak acuh. Kebetulan Pak Bei, salah satu tokoh utama dalam *Canting*, adalah pendukung setia negara, baik negara Orde Lama maupun Orde Baru. Kayam dalam *Para*

Priyayi mencoba mengklarifikasi peristiwa 1965, ketika sejumlah tokohnya, terutama Harimurti, masih sedang mahasiswa. Harimurti mengaku kalah dan salah dan dia sempat dihukum. Kecenderungan mengungkit peristiwa trauma 1965 itu dinilai Foulcher (1987) sebagai keberanian yang sangat terbatas dengan sensor diri-sendiri yang sangat kuat.

Seperti diketahui, novel pada tahun 1980-an hingga 1990-an awal sebagian besar ber-*setting*-kan pedesaan atau kota kecil. Sudah menjadi pengetahuan bahwa kekuasaan politik rezim Orde Baru demikian kuat dan mencengkram. Kekuasaannya meliputi dan menembus berbagai aspek kehidupan. Orang tidak memiliki keleluasaan berbicara/bercerita tentang aspirasi politiknya, tidak boleh mewacanakan sesuatu yang sensitif atau bersentuhan dengan politik kekuasaan pusat (nasional).

Salah satu siasat untuk seolah menjauh dari jangkauan kekuasaan politik pusat, para pengarang memindahkan lokasi penceritaan ke desa-desa (atau kota-kota kecil), peristiwa dilokalisasikan sebagai peristiwa kecil di sebuah tempat yang tidak begitu penting, dengan tokoh-tokoh lokal, dengan urusan yang bersifat keseharian, masalah tradisi dan sosial yang sedang berubah. Tohari di awal cerita dalam *Ronggeng Dukuh Paruk* mengidentifikasi lokasi penceritaan di sebuah desa Paruk, bukan di tempat lain, dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di pusat politik. Umar Kayam dengan *Para Priyayi* melokalisasi cerita di sebuah tempat bernama Wanagalih dan sekitarnya. Peristiwa apa pun yang terjadi di sebuah tempat nun jauh dari pusat kekuasaan, mungkin tidak akan mengganggu stabilitas nasional.

Ada pula pengarang yang memulai cerita dengan memperkenalkan bakal tokoh, tokoh lokal, orang kecil yang "*ndeso*", sederhana, tidak berpikir macam-macam, apalagi memiliki prasangka-prasangka politik, misal novel Kuntowijoyo, *Pasar* yang diawal cerita memperkenalkan tokoh Mantri Pasar. Atau gabungan keduanya memperkenalkan tokoh dan lokasi penceritaan seperti karya Linus Suryadi AG dalam *Pengakuan Pariyem*, juga dalam *Burung-Burung Manyar* karya Mangunwijaya.

Akan tetapi, pembaca yang cukup jeli tentu mengetahui bahwa apa pun yang diceritakan dalam berbagai peristiwa di desa (kota kecil) itu, sebetulnya secara keseluruhan ingin menyindir bahwa telah terjadi pengerdilan, pembodohan, atau semacam sikap pelarian (eskapisme), dan bahwa berbagai cerita itu sedang menyindir

kekuasaan nasional yang menakutkan. Siasat itu ternyata sukses, banyak novel yang tidak terdeteksi sebagai sesuatu yang sebetulnya sangat politis. Akan tetapi, pilihan cerita seperti itu bukan tanpa risiko. Jalur aman yang dihadirkan oleh sebagian besar novel 1980-an dan 1990-an awal menjadikan sastra seolah tidak memiliki sifat kritis. Mereka hanya menjadi bahan studi yang bersifat eksklusif.

Dalam konteks itulah sastra menjadi sesuatu yang traumatik. Sastra traumatik adalah sastra yang ditulis dalam kenangan berdarah, dalam bayang-bayang ancaman negara menghancurkan musuh-musuh politiknya. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan peristiwa 1965, peristiwa itu ditulis tidak dalam rangka membela negara Orde Baru, tetapi lebih dalam semangat refleksi, semangat mengklarifikasi berbagai peristiwa, juga terjadi kompromi-kompromi. Aspek-aspek PKI tidak didramatisasikan sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi dipojokkan ke dalam satu posisi yang berhadapan dengan kepentingan negara, terutama berhadapan dengan apartus negara. Wacana seperti itu dapat dilihat dalam novel-novel seperti disebut di atas.

Seperti diketahui, kembali terjadi peristiwa besar tahun 1998 yang juga sangat berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Peristiwa 1965 berbeda jauh dengan peristiwa 1998. Memang sama-sama memakan korban besar, tetapi korban 1998 jumlahnya jauh lebih kecil. Menurut perhitungan, selama pergolakan tersebut telah memakan korban antara 3500 hingga 5000 jiwa. Hal paling penting adalah substansi sebab dari terjadinya pergolakan itu. Pada 1965 yang bertarung adalah sekelompok elit dalam pertentangan ideologi yang keras, yang pada gilirannya melibatkan sebagian besar orang Indonesia. Artinya, pada mulanya, konflik itu bukan persoalan negara berhadapan dengan masyarakat, tetapi justru sekelompok elit tertentu (kelompok Soekarno berhadapan dengan kelompok militer yang diatur Soeharto) memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan negara.

Konflik pada tahun 1998 adalah konflik atau perang antara masyarakat melawan negara (Orde Baru). Kebencian masyarakat kepada negara Orde Baru yang militeristik, manipulatif, penuh dengan KKN, dan sebagainya (yang waktu itu jarang muncul ke permukaan) membuat pertentangan hanya berujung dalam dua oposisi besar, masyarakat melawan negara (Orde Baru). Jika pada tahun 1965 yang mati adalah mereka yang dituduh PKI atau mereka yang dituduh aparat atau antek kapitalis yang pro-negara, maka

mereka yang mati pada tahun 1998 adalah mahasiswa atau masyarakat yang mendukung mahasiswa/masyarakat yang sedang melawan negara.

Kemudian kekuasaan negara berganti dengan cepat kepada satu era reformasi yang dimulai oleh Habibie. Akan tetapi, Habibie dengan cepat terjungkal karena masih berbau Orde Baru. Muncullah secara berturut-turut tokoh-tokoh reformasi, yang pada masa Ode Baru adalah mereka yang disia-siakan seperti Abdurrahman Wahid dan Megawati. Orde Reformasi mencoba melakukan rekonsiliasi terhadap peristiwa traumatik 1965, dan hingga hari ini berbagai kajian tentang itu masih cukup banyak dilakukan (Budiawan, 2006). Hal yang utama dari Orde Reformasi adalah kekuasaan baru tidak dilandasi oleh peristiwa traumatik, tetapi justru peristiwa heroik. Hampir sebagian besar masyarakat merasa "menjadi pahlawan" terhadap upaya penumbangan rezim Orde Baru.

3. Sastra Heroik

Dalam kondisi semangat "menjadi pahlawan" reformasi itulah novel-novel pada tahun 1998, dan setelahnya, mulai bermunculan. Kita tahu bahwa peristiwa 1998 adalah perang anak-anak muda melawan negara dan aparatus Orde Baru. Berbeda dengan novel-novel 1980-an dan 1990-an awal, novel-novel setelah 1998 sebagian besar justru diambil alih oleh anak-anak muda. Mereka menawarkan tema-tema yang jauh lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Jalur bercerita dengan gaya kritik ideologis dan budaya model Toer yang pernah ditutup oleh Orde Baru kembali dibuka. Masalah-masalah etnis dan atau SARA yang sensitif menjadi cerita yang biasa, misalnya terlihat dalam novel *Liem Hwa*.

Sekelompok pemuda/di di Jakarta (Forum Lingkar Pena) menawarkan cerita-cerita dakwah dengan semangat menegakkan syariat Islam, suatu hal yang riskan pada masa Orde Baru karena bisa dianggap subversif memberikan hukum tandingan selain hukum yang dibangun negara. Novel-novel dari penulis Forum Lingkar Pena cukup banyak antara lain karya-karya Asma Nadia (Asmarani Rosalba) seperti *Rembulan di Mata Ibu* (Mizan, 2001) dan *Dialog Dua Layar* (Mizan, 2002), atau Helvy Tiana Rosa dengan novelnya yang terkenal *Ketika Mas Gagah Pergi* (Mizan, 2000).

Sebagian anak muda yang lain mengabaikan nasionalisme dan memilih menjadi warga dunia atau warga dunia maya, seperti

tampak pada *Saman* dan *Supernova*. Hal itu terjadi, di samping pengaruh langsung perkembangan teknologi dan globalisasi, juga sebagai satu dampak dari kekecewaan generasi muda terhadap negara Orde Baru Indonesia. Secara sinis *Saman* tidak ketinggalan menyindir kekuasaan ABRI, wacana kuasa yang menyebabkan orang "dikirikan", dan berbagai perlawanan terhadap institusi-institusi nilai yang mapan yang dibangun Orde Baru.

Dari sekitar 50 buah novel yang sempat dijangkau, paling tidak hampir sebagian besar novel ber-*setting*-kan tahun-tahun setelah reformasi itu sendiri. Cerita-cerita banyak mempersoalkan kebobrokan negara, korupsi, nepotisme, kolusi, demonstrasi menentang ketidakadilan aparatus negara, kebusukan politik (nasional atau aparat pemerintah), dan sebagainya. Masyarakat juga dikritik dan digambarkan sebagai sangat rusak, tetapi kerusakan itu sebagai akibat produk negara Orde Baru. Kesemuanya itu diceritakan secara telanjang dan nyaris "vulgar". Pada umumnya, rentang waktu penceritaan jauh lebih pendek, yakni pada masa-masa sekarang. Beberapa di antaranya memulai cerita pada masa Orde Baru, dan di selesaikan pada masa reformasi.

Novel-novel beberapa tahun belakangan ini kembali memindah-kan lokasi penceritaan ke kota-kota (atau beberapa kota setingkat propinsi), lokasi yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Mulai dari *Saman, Supernova*, dan sejumlah novel yang terbit pada tahun 2000-an seperti *Ketika Lampu Berwarna Merah*, *Jejak Sang Pembangkang, Tapol*, dan sebagainya. Para tokoh juga berganti, mereka relatif terpelajar yang tahu politik, yang mengerti sosiologi dan demokrasi, yang memiliki pengetahuan cukup luas.

Persoalan latar tempat penceritaan berkorelasi langsung dengan latar waktu penceritaaan. Novel-novel pada zaman Orde Baru, selain memiliki keengganan untuk bercerita dengan lokasi yang dekat dengan kekuasaan pusat, juga sebagian besar, mengalihkan waktu peceritaan pada masa lalu, masa penceritaan yang secara tidak langsung tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian aktual pada masa Orde Baru. Artinya, kalau ada yang salah pada masa Orde Baru, yang salah bukan rezim Orde Baru, tetapi yang salah adalah masa lalu, masa penjajahan, atau masa Orde Lama. Saya merasa hal ini bukan sebagai bagian dari suksesnya negara (Orde Baru) menghegemoni para pengarang, tetapi lebih sebagai stretegi untuk mengamankan cerita.

Hal tersebut berbeda dengan novel-novel beberapa tahun belakangan. Novel-novel seperti, *Orang-Orang Proyek* (Ahmad Tohari, 2003)), *Wasripin dan Satinah* (Kuntowijoyo, 2003)), *Tuhan Tiri* (Aris Wahyudi, 2003), *Tanah Ombak* (Abrar Yusra, 2003), *Epigram* (Jamal, 2006), *Kabut dan Mimpi* (Budi Sarjono, 2004), *Kali Code, Pesan-Pesan Api* (Mustofa W Hasyim, 2005), *Memburu Matahari* (Nadjib Kertapati Z, 2003), *Gelombang Sunyi* (Taufik Ikram Jamil, 2001), *Tersentuh Ilalang* (Afifah Afra, 2003), bercerita dengan waktu sekarang yang sedang terjadi. Memang, Ahmad Tohari dan Kuntowijoyo tetap dengan *setting* desa (kota kecil), tetapi waktu kejadiannya tidak masa lalu. Di samping itu, cerita yang diusung Kuntowijoyo dan Tohari secara langsung dan eksplisit mempersoalkan kebusukan birokrasi (politik negara), partai-partai, atau proyek-proyek yang diselenggarakan oleh negara.

Umar Kayam, generasi senior, seseorang yang sangat santun dalam menulis novel Para Priyayi (1992) pun tidak mau ketinggalan. Dalam Jalan Menikung (1999), dengan humor sarkatis dan ironis ia menyesali dan menelanjangi praktik politik Orde Baru, yang masih melakukan "operasi litsus" dan "tidak bersih"-nya sehingga seorang yang sangat briliyan, seperti Eko, anak Harimurti, tidak dapat bekerja di Indonesia karena Eko adalah anak mantan PKI. Padahal Eko adalah seseorang yang sangat mencintai Indonesia dan sangat ingin mengabdikan ilmunya di Indonesia. Karena bekerja di Indonesia sangat berbahaya bagi Eko, terpaksa ia bekerja di Amerika Serikat.

Dengan demikian, novel-novel setelah 1998, suatu masa yang disebut reformasi, tidak lagi berandai-andai dengan melarikan kesalahan sejarah masa lalu, tetapi lebih mendesak untuk memperbaiki keadaan sekarang yang memperihatinkan dalam segala sisinya, segera. Novel reformasi cenderung tidak lagi "merekonstruksi sejarah", tetapi berbagai kebusukan sekarang, seharusnya bisa segera diperbaiki, tidak perlu menyalahkan sejarah masa lalu. Beberapa novel mulai mengambil setting pada masa Orba sebagai awal mula berbagai kebrengsekan dan kebobrokan yang ditemukan sekarang.

Memang, novel-novel reformasi lebih cenderung bercerita dalam "suasana" reaktif daripada reflektif. Terdapat sejumlah ketegangan antara harapan (reformasi di segala bidang kehidupan) dan kenyataan yang dihadapi. Semangat reformasi, dan tidak ada lagi yang perlu ditakuti, menyelimuti sebagian besar novel-novel-novel kita hari-hari ini.

4. Penutup

Sejumlah novel setelah tahun 1998 ingin saya sebut sebagai novel atau sastra heroik. Yang dimaksud dengan sastra heroik adalah penulisan novel dengan semangat "kepahlawanan" melawan atau membersihkan segala hal yang berbau Orde Baru, atau mencoba memerangi segala sesuatu yang dianggap bersifat seperti Orde Baru. Itulah sebabnya, sering ada selorohan untuk mengkritik mereka yang tidak disukai, yang mentang-mentang, seperti ungkapan "Wah, Orde Baru banget". Dalam semangat tersebut masyarakat ditempatkan dan berhadapan dengan negara.

Jika sastra traumatik novel ditulis dengan melakukan berbagai kompromi, masyarakat secara hati-hati tidak dihadapkan dengan negara, maka pada sastra heroik masyarakat secara langsung di-hadapkan kepada negara atau khususnya elemen-elemen negara atau sifat-sifat yang berbau Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Atmowiloto, Arswendo. 1986. *Canting*. Jakarta: Gramedia.

Balibar, Etienne dan Pierre Macherey. 1987. "On Literature As an Ideological Form", dalam Robert Young, *Untying The Text: A Post-Structuralist Reader*. London and New York: Routledge and Kegan Paul.

Budiawan. 2004. Mematahkan Pewarisan Ingatan Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto. Jakarta: ELSAM.

Damono, Sapardi Djoko. 1984. Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dee (Dewi Lestari). 2001. *Supernova*. Bandung: Truedee Books.

Emmerson, Donald K. 1978. "The Bureaucracy in Political Context: Weakness in Strenght", dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye (Ed.). *Political Power and Communications in Indonesia*. Berkeley: University of Calofornia Press.

Foucault, Michel. 1987. "The Order of Discourse", dalam Robert Young, *Untying The Text: A Post-Structuralist Reader*. London and New York: Routledge and Kegan Paul.

Foulcher, Keith. 1987. "Historical Past and Political Present in Recent Indonesian Novels," paper seminar *The Trauma of 1965: Meaning and Memory*, Melbourne.

Grebstein, Sheldon Norman. 1968. *Perspectives in Contemporary Criticism*. New York: Harper Row.

Heryanto, Ariel (ed.). 1985. *Perdebatan Sastra Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Press.

Kayam, Umar. 1992. *Para Priyayi*. Jakarta: Gramedia

Kayam, Umar. 1999. *Jalan Menikung (Para Priyayi 2)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Kuntowijoyo. 1994. *Pasar*. Yogyakarta: Bentang.

Kuntowijoyo. 2000. *Mantara Penjinak Ular*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Kuntowijoyo. 2003. *Wasripin dan Satinah*. Jakarta: Kompas.

Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim. 1996. "Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.

Mangunwijaya, YB. 1999 (Cet. 1981). *Burung-Burung Manyar*. Jakarta: Djambatan.

Payne, Michael. 1997. *Reading Knowledge An Introduction to Barthes, Foucault, and Derrida*. Malden, Massachusetts: Blackwell.

Storey, John. 1993. *An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture*. London: Harvester Wheatsheaf.

Sulistyo, Hermawan. 2000. *Paru Arit di Ladang Tebu. Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966).* Jakarta: KPG.

Suryadi Ag, Linus. 2002 (Cet. 1. 1981). *Pengakuan Pariyem.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Toer, Pramoedya Ananta. 1980. *Bumi Manusia.* Jakarta: Hasta Mitra.

Tohari, Ahmad. 1982. *Ronggeng Dukuh Paruk.* Jakarta: Gramedia.

Tohari, Ahmad. 1985. *Lintang Kemukus Dini Hari.* Jakarta: Gramedia.

Tohari, Ahmad. 1986. *Jantera Bianglala.* Jakarta: Gramedia.

Tohari, Ahmad. 2004. *Orang-Orang Proyek.* Yogyakarta: Mahatari.

Utami, Ayu. 1999. *Saman.* Jakarta: Gramedia.